

DAMPAK KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA (STUDI KASUS DI KAWASAN MUARA ANGKE)

THE IMPACT OF SOCIAL ECONOMIC INEQUALITY ON THE SISHANKAMRATA (CASE STUDY IN MUARA ANGKE)

Amar Muchaqqi¹, Muhammad Halkis², Aris Arif Mundayat³

Program Studi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan
(amarmuhaqi@gmail.com)

Abstrak - Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishakamrata) tidak hanya melibatkan komponen utama yaitu TNI dan POLRI, namun juga warga negara secara menyeluruh dan wilayah serta sumber daya nasional lainnya untuk menghadapi ancaman baik militer, non-militer atau hibrida yang berdampak pada stabilitas ipoleksosbudhankam. Rasio gini Indonesia saat ini adalah 0,389, lebih tinggi 0,01 dari 8 tahun yang lalu dan Rasio Gini Ibukota diperkirakan 0,5 lebih tinggi dari Rasio Gini agregat nasional. Meskipun tingkat kemiskinan Indonesia terus menurun, Indonesia belum berhasil mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dalam kurun waktu 2 dekade semenjak krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil, yang berarti Indonesia sedang menghadapi ancaman non-militer berdimensi ekonomi sampai saat ini. Menurut teori Deprivasi Relatif, pada intensitas tertentu, kesenjangan ekonomi sosial dapat mengakibatkan keresahan sosial. Selain itu, lemahnya kondisi atau kualitas ekonomi masyarakat dengan adanya ketimpangan ekonomi juga berpengaruh terhadap sishankamrata yang melibatkan seluruh warga Indonesia sebagai komponen pembentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Untuk itu, penelitian mengenai dampak ketimpangan sosial ekonomi pada sishankamrata menjadi penting dalam rangka peningkatan daya tangkal pertahanan negara terhadap berbagai bentuk ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ketimpangan sosial ekonomi terhadap sishankamrata. Teori dan konsep yang digunakan adalah keadilan distributif, keresahan sosial, ketimpangan, Deprivasi Relatif, sishankamrata, ancaman dan ekonomi pertahanan melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berlokasi di Muara Angke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi berdampak negatif pada sishankamrata pada dua dimensi, yaitu pelemahan dan ancaman.

Kata kunci: ketimpangan, sosial, ekonomi, Sishankamrata.

Abstract - Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishakamrata) does not only involve the main components, namely the TNI and POLRI, but also citizens as a whole and other national territories and resources to deal with threats either military, non-military or hybrid which impact on the stability of ipoleksosbudhankam. Indonesia's current gini ratio is 0.389, 0.01 higher than 8 years ago and the Capital Gini ratio is estimated to be 0.5 higher than the national aggregate Gini ratio. Although the level of poverty in Indonesia continues to decline, Indonesia has not succeeded in overcoming the problem of economic inequality in the past two decades since the economic crisis. This shows that Indonesia's economic conditions are unstable, which means that Indonesia is facing a non-military threat in economic dimensions. According to the theory of Relative Deprivation, at a certain

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

intensity, socio-economic inequality can lead to social unrest. In addition, the weak economic condition or quality of the community with economic inequality also affects Sishankamrata, which involves all Indonesians as a component of the defense and security forces. For this reason, research on the impact of socio-economic inequality on sishankamrata has become important in order to increase the deterrence of national defense against various forms of threats. This study aims to understand the impact of socio-economic inequality on sishankamrata. The theories and concepts used are distributive justice, social unrest, inequality, relative deprivation, sishankamrata, threats and defense economics through qualitative methods with a case study approach located in Muara Angke. The results of the study indicate that socio-economic inequality has a negative impact on sishankamrata on two dimensions; weakening and threat.

Keywords: inequality, social, economic, Sishankamrata.

Pendahuluan

Pasal 30 ayat 2 dalam UUD 1945 menyebutkan “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) tidak hanya melibatkan komponen utama yaitu TNI dan POLRI, namun juga warga negara secara menyeluruh dan wilayah serta sumber daya nasional lainnya untuk menghadapi ancaman.⁴ Sistem pertahanan ini mencakup tiga komponen dalam membentuk pertahanan dan keamanan yang menempatkan TNI dan

POLRI serta seluruh warga negara dalam komponen tersebut. Mengenai ancaman, Kementerian Pertahanan dalam Buku Putih Pertahanan 2015 menjelaskan bahwa ancaman terbagi menjadi tiga: ancaman militer baik itu yang tidak bersenjata maupun bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.⁵ Ancaman yang sering luput dari pengawasan adalah ancaman non-militer yang cenderung tidak terlihat. Ancaman non-militer pada hakikatnya merupakan ancaman yang bersifat non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Kemhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015) hlm. 22.

serta keselamatan umum.⁶ Ancaman pada salah satu aspek baik itu militer, maupun nonmiliter mempunyai potensi dalam memperlemah sistem pertahanan Indonesia secara menyeluruh. Salah satunya adalah ancaman dalam dimensi ekonomi. Ancaman dalam dimensi ekonomi yang dialami Indonesia saat ini adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, inflasi, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas atau ketimpangan distribusi pendapatan.⁷ Hal-hal tersebut di atas merupakan ketidakstabilan ekonomi yang seringkali menimbulkan masalah yang lebih luas. Oleh sebab itu, ketidakstabilan dalam bentuk apapun dalam perekonomian Indonesia merupakan ancaman nyata terhadap negara ini.

Salah satu contoh dikemukakan oleh Vedi Hadiz (2011) dalam tulisannya yang menghubungkan antara kesenjangan ekonomi sosial dengan politik. Dia menunjukkan bahwa pergerakan islam politik diperlakukan sebagai respon populis terhadap ketegangan dan kontradiksi kapitalisme global. Tanggapan populis di sini terkait

dengan keluhan dan aspirasi berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin kota, yang keanggotaannya telah membengkak seiring dengan proses modernisasi. Dia juga menyebutkan contoh lain yaitu tulisan Alejandro Colas yang mengacu pada politik Islam di Maghreb sebagai respon populis terhadap masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan kapitalis, tetapi lebih khusus lagi pada fase globalisasi ekonomi neo-liberal.⁸ Berarti, populis yang disebutkan oleh Hadiz merespon perkembangan kapitalis dan ketimpangan dengan upaya politik demi menghilangkan keresahan terkait dengan masalah sosial ekonomi.

Berkaitan dengan hubungan antara kesenjangan ekonomi sosial dengan respon yang dijelaskan oleh Hadiz di atas, Ted Robert Gurr (1970) menjelaskan bahwa proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk belajar menghindari rangsangan yang tidak menyenangkan. Rangsangan tersebut mendorongnya untuk merespon dengan tindakan inovatif yang salah satunya adalah

⁶ Agus Supriatna, *Pertahanan Nasional dalam Perspektif Ekonomi*, (Bandung: Unpad Press, 2017), hlm. 48.

⁷ *Ibid.*

⁸ Vedi Hadiz, "Indonesian Political Islam: Capitalist Development and The Legacies of The Cold War", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2011, hlm. 7.

berupa tindakan kekerasan.⁹ Contohnya, Pada tanggal 11 Agustus 2018 silam, diberitakan sebuah kasus pembunuhan yang oleh seorang pelaku yang sering mendapatkan ejekan karena gajinya lebih kecil.¹⁰ Tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh pelaku karena keresahan yang dia alami yang berawal dari masalah ketimpangan yang kemudian membuat dirinya merasa terdeprivasi.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan, Amartya Sen di dalam artikelnya menyatakan bahwa kemampuan pada seseorang akan muncul jika potensi yang ada di setiap individu terberdayakan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia butuh untuk terberdayakan secara adil agar potensinya dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Teori-teori keadilan tradisional yang dirumuskan oleh para filsuf politik, para ahli hukum dan ekonom, semuanya cenderung melihat ketidakadilan sebagai sekadar pelanggaran keadilan, suatu uraian tatanan normal. Karya Amartya Sen

bertindak sebagai koreksi terhadap tradisi ini dengan menyatakan bahwa kita dapat mengenali bentuk ketidakadilan, dan mencapai kesepakatan yang masuk akal tentang perlunya untuk memperbaikinya, tanpa mengacu pada teori keadilan yang eksplisit. Dalam hal ini, pandangan bersama tentang keadilan merupakan hal yang penting.¹² Pandangan yang berorientasi menghilangkan kesenjangan ekonomi, yang selain dapat meminimalisir potensi ancaman yang ditumbulkannya juga dapat menciptakan kemampuan tersendiri bagi Indonesia, dalam hal ini adalah kemampuan ekonomi. Kemampuan tersebut selain dapat membantu memperkuat sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta juga dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memperbaiki kondisinya sendiri dapat membantu negara mengurangi masalah kemiskinan.

Berdasarkan hal di atas, penelitian tentang bagaimana aspek ekonomi dapat mengakibatkan keresahan dalam

⁹ Ted Robert Gurr. *Why Men Rebel*, (New Jersey: Princeton University Press, 1970), hlm. 22-23.

¹⁰ Candra Isriadhi, "Karena Sering Diejek Teman Gaji Lebih Kecil, Pria Ini Tega Habisi Kedua Rekan Kerjanya", dalam <http://style.tribunnews.com>, diakses pada 2 September 2018.

¹¹ S. Syawaluddin, "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan kemiskinan", *Jurnal Al-Buhuts*, Volume 11 Nomor 1 Juni, 2015, hlm. 3.

¹² Reiko Gotoh dan Paul Dumouchel, *Against Injustice the New Economics of Amartya Sen*, (Cambridge: Cambridge university Press, 2009), hlm. 1.

berbagai skala serta hubungannya dengan pertahanan negara menjadi penting untuk dilaksanakan. Sekalipun Sen menyadari kemakmuran ekonomi dan kebebasan substantif tidak saling berhubungan tapi seluruh dimensi kehidupan adalah termasuk kemanan bersama (negara) walaupun sering diabaikan banyak ahli ekonomi.¹³ Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti Muara Angke sebagai salah satu daerah yang mengalami ketimpangan yang cukup tinggi di Jakarta, dengan dasar hipotesis bahwa kondisi ketimpangan tersebut dapat berdampak pada sishankamrata menggunakan perspektif ilmu pertahanan, khususnya pada dimensi ekonomi.

Fokus penelitian ini adalah “memahami dampak ketimpangan sosial ekonomi terhadap Sishankamrata”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti berusaha meneliti satu daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi yaitu Jakarta, tepatnya di Kawasan muara

angke kelurahan Pluit, dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap strategi pertahanan semesta.

Pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara secara mendalam. Subyek yang merupakan sumber data primer dari penelitian ini adalah penduduk yang tinggal di Kawasan muara angke dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan dengan isu ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Subyek tersebut mencakup empat golongan masyarakat yaitu: penduduk setempat, aparat keamanan, Pemerintah dan pengusaha. Selain berpegang pada hasil wawancara, peneliti juga mengumpulkan data yang menunjang analisis dengan mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, dokumen dan data lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber tertulis, foto-foto dan data statistik yang menggambarkan fenomena ketimpangan sosial ekonomi; dan dokumen.

Setelah pengumpulan data dilakukan, upaya selanjutnya yakni melakukan analisa atas hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait yang telah

¹³ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2009), hal. 226.

dikumpulkan. Analisa data menggunakan Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2002) dimana data yang telah dikumpulkan (data collection) akan diabstraksikan (data condensation) dan disajikan (data display) untuk dilihat keterkaitannya sehingga dapat diverifikasi dan ditarik suatu kesimpulan (conclusions: drawing/verifying).

Pembahasan

Gambaran Umum

Secara geografis, Kawasan ini berbatasan dengan Kali Angke di sebelah Barat dan Selatan, Jalan Karang Pluit di sebelah Timur, serta Laut Jawa di sebelah Utara. Lokasi Muara Angke sebagai salah satu daerah di kota metropolitan Jakarta dapat diakses dengan mudah melalui transportasi umum. Kondisi jalan menuju lokasi beraspal dengan sarana transportasi yang memadai. Kawasan ini mempunyai kontur permukaan tanah datar, dengan ketinggian 0 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Muara Angke termasuk di dalam wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara yang disebut juga sebagai Kampung Nelayan Jakarta memiliki luas sekitar 63,993 hektar.

Kelurahan Pluit terdiri dari 22 RW yang terbagi menjadi tiga kawasan yaitu: Muara Karang, Pluit dan Muara Angke. Muara Angke sendiri terdiri dari lima RW yaitu RW 1, 11, 20, 21 dan 22, sedangkan Pluit terdiri dari RW 4, 5, 7, 9 16 dan 19 sedangkan sisanya termasuk kawasan Muara Karang. Wilayah Muara Angke terdiri dari Kampung Nelayan perumahan Nelayan Bermis, Pasar Tradisional, Kali Asin, Pasar Grosir Ikan Basah, Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional dan Kali Adem. Kali Adem sepanjang 4 km yang perbatasan dengan kali Angke mempunyai Pintu Air Gedung Pompa. Sebelah barat kawasan perumahan muara angke berbatasan dengan hutan mangrove atau bakau yang merupakan kawasan konservasi.

Awalnya nelayan tradisional di Kali Adem berjumlah relatif sedikit, hanya nelayan pindahan dari Pademangan dan Ancol Jakarta Utara yang merupakan penduduk asli Jakarta. Pada Tahun 1999 ada pembongkaran di kali Asin untuk dibuat Dermaga Kapal dan dengan berkembangnya jaman perahu, nelayan tradisional tersingkir dengan kapal - kapal GT (Gross Ton) 10. Akhirnya perahu - perahu nelayan tradisional dibawah GT 7 pindah ke kali adem dan menetap di Kali Adem sampai sekarang. Pemindahan

perahu-perahu tradisional juga diiringi dengan berpindahnya nelayan serta keluarganya ke Kali Adem. Kemudian, pada zaman pemerintahan gubernur Sutioso tepatnya pada Tahun 2003, pemukiman nelayan tradisional yang berada di sepanjang bantaran Kali Adem mengalami penggusuran. Nelayan tersebut kemudian diberikan rumah susun oleh yayasan Budha Tzu Chi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ratusan kepala keluarga Nelayan yang mendapatkan fasilitas Rusun dari yayasan Budha Tzu Chi yang baru akan diresmikan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu para warga yang pada saat itu belum memiliki hunian selama masa konstruksi rumah susun tersebut, menetap di daerah pengasinan ikan. Dengan demikian, terbentuklah pemukiman nelayan tersebut sampai sekarang.

Warga pemukiman nelayan di muara angke pada umumnya adalah pendatang. Penduduk rumah susun Budha Tzu Chi sekarang tercatat sebagai warga resmi RW 20 kelurahan Pluit kecamatan Penjaringan awalnya adalah pendatang yang menempati sebagian pemukiman nelayan di Kali Adem, bukan asli warga Jakarta. Bukan hanya RW 20, warga RW 22 yang merupakan RW baru

yang baru diresmikan bulan Februari tahun 2018 Juga hampir seluruhnya adalah pendatang yang sebagian belum mempunyai KTP Jakarta atau bisa dikatakan sebagai pemukim tidak resmi. Sampai saat ini, masih terdapat pemukiman kumuh di kawasan muara angke yang belum memenuhi kriteria standar hidup yang layak khususnya di RW 22 yang terletak di pesisir dan sekitarnya yang sebagiannya merupakan bekas empang atau rawa. Sejumlah rumah tangga di kawasan tersebut khususnya di bagian bibir pantai tidak memiliki fasilitas pembuangan air yang layak, sehingga untuk buang air besar penduduk langsung melakukannya di pinggir laut. Selain itu, masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air bersih dan layak di daerah tersebut.

Penduduk pesisir yang sekarang diresmikan sebagai warga RW 22 kelurahan penjaringan mayoritasnya adalah para pendatang. Mereka menempati kawasan empang dengan membangun rumah panggung di atasnya. Berjumlah sekitar 386 kepala keluarga mereka terbagi menjadi 11 suku yang masing-masing dikepalai oleh kepala suku. Mereka kemudian beranak pinak hingga mencapai ribuan dan menempati



Gambar 1. Pembagian wilayah Muara Angke
 Sumber: Google Map diolah (2019)

kawasan tersebut dan enggan tinggal di rumah susun yang telah selesai pembangunannya meskipun mendapat jatah ruangan di sana dikarenakan lebih dekat dengan perahu, alat untuk mereka mencari penghidupan. Saat ini, para kepala suku tersebut ditunjuk sebagai ketua RT di RW 22. Selain penduduk yang telah terdaftar sebagai warga RW 22, ada sebagian penduduk yang tidak memiliki hunian tetap berupa rumah pada umumnya dan tidak terdaftar. Tanah yang mereka tempati pun milik negara dan mereka menempatinnya secara cuma-cuma tanpa membayar pajak apapun, oleh sebab itu, kawasan yang mereka tempati disebut sebagai Grey Area oleh pemerintah setempat.

Selain itu, terdapat pula kawasan perumahan “Tembok Bolong”,. Kawasan ini berisikan perumahan penduduk yang kurang layak karena dibangun dengan bahan bangunan seperti seng bekas, kardus dan banan apa adanya yang data ditemukan dan dimanfaatkan. Penduduk menempati area bekas pembuangan sampah yang sebelumnya adalah empang atau rawa yang kemudian tertimbun sampah. Perumahan di kawasan tersebut umumnya berupa rumah panggung dengan dasar endapan sampah dan air dan terletak di bawah jalur tiang listrik bertegangan tinggi atau yang lebih dikenal orang sekitar sebagai sutet. Kawasan ini juga termasuk “wilayah abu-abu” karena merupakan tanah yang



Gambar 2. Kawasan Tembok Bolong
Sumber: Diolah oleh peneliti (2019)

ditempati masyarakat setempat tanpa perizinan dan penggunaannya tidak jelas. Istilah tembok bolong sendiri merupakan sebutan bagi area tersebut oleh warga sekitar karena tembok yang dibangun oleh pemerintah setempat demi merapikan kawasan itu berlubang (bolong). Lubang tersebut diketahui sengaja dibuat oleh penghuni area tersebut untuk jalan pintas menuju jalan utama karena jalan masuk dan keluar terletak lumayan jauh dari pemukiman mereka. Setelah ditutup kembali dan diberikan tanda peringatan berupa spanduk bertuliskan himbauan dari pemerintah setempat, warga tembok bolong menggunakan tangga sebagai alternatif jalan pintas menuju jalan utama.

Kondisi ketimpangan baik sosial

maupun ekonomi secara umum terlihat jelas di kawasan muara angke khususnya di sekitar wilayah abu-abu dan sekitarnya. Meskipun banyak perumahan kumuh yang berada di bawah standar kelayakan, di dalam kawasan di RW 22 dan sekitarnya juga ditemukan warga dengan kondisi rumah yang layak bahkan bisa dibilang bagus. Masjid nya pun bisa dibilang makmur dengan infrastruktur yang lumayan bagus dan baru. Sejumlah warga memiliki barang-barang yang relatif mewah jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat pada umumnya seperti mobil, AC, motor sport dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa bangunan besar yang digunakan sebagai gudang hasil tangkapan nelayan usaha perikanan. Ada

juga beberapa tempat perebusan tulang ikan milik perusahaan tertentu yang beroperasi di kawasan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan dengan heterogenitas struktural yang relatif tinggi.

Untuk itu, peneliti meneliti kawasan RW 22 dan sekitarnya demi memperoleh informasi tentang kesenjangan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut dan hubungannya dengan sishankamrata. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan perspektif tersendiri dalam ilmu pertahanan khususnya dalam segi non-militer yaitu disiplin ekonomi pertahanan.

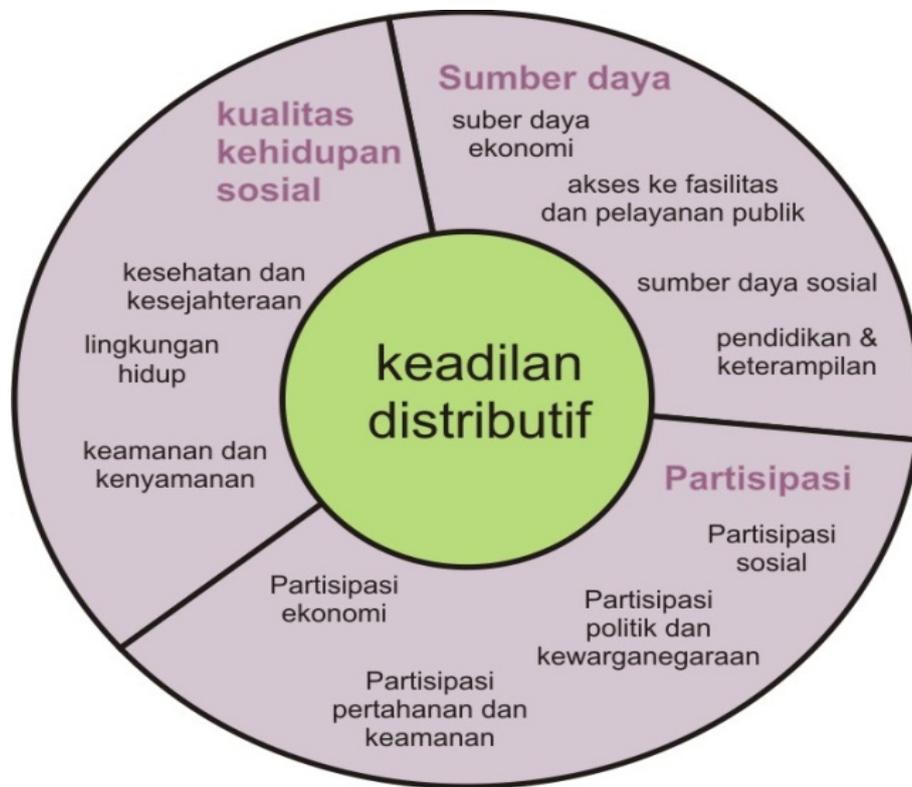
Dampak Lemahnya Keadilan Distributif pada Masyarakat Muara Angke

Konsep Keadilan Distributif digunakan sebagai standar pemerataan sosial ekonomi sebagai antitesis dari kasus ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di kawasan Muara Angke. Hal ini selaras dengan apa John Rawls sampaikan dalam bukunya *A Theory of Justice*. Dia mengemukakan bahwa ketidakadilan, sederhananya adalah ketimpangan yang tidak menciptakan

keuntungan bagi seluruh komponen dalam suatu kelompok sosial.¹⁴ Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa keadilan distributif mempunyai dua prinsip, yaitu persamaan hak dan kebebasan dan jika ada Ketimpangan sosial dan ekonomi, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.

Kondisi ini sangat erat hubungannya dengan sistem politik yang berlaku sebagai regulator yang mengatur ketimpangan tersebut. Hal ini berarti bahwa, ketimpangan yang terjadi di muara angke merupakan masalah kompleks yang melibatkan beberapa dimensi dan domain lainnya. ketimpangan tersebut melibatkan kelemahan akses dalam mendapatkan sumber daya, fasilitas dan pelayanan publik dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan dan aktivitas normal yang tersedia bagi sebagian besar masyarakat dalam suatu kelompok sosial, baik ekonomi, politik, maupun upaya pertahanan dan keamanan. selain itu, ketimpangan tersebut juga mempengaruhi baik kualitas kehidupan baik secara individu

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Belknap Press, 1999), hlm. 4.



Gambar 3. Matriks Keadilan Distributif
 Sumber: data diolah oleh peneliti, 2019

maupun secara menyeluruh sebagai satu kesatuan kelompok sosial. Merangkum hal tersebut, penurunan pada keadilan distributif berefek pada kualitas kehidupan sosial, sumber daya dan partisipasi.

Gambar 3 merupakan matriks yang berdasar atas temuan peneliti di lokasi penelitian yang kemudian digabungkan dengan konsep keadilan distributif oleh John Rawls. Keadilan distributif merupakan variabel kompleks dan tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Keadilan tersebut terkonstruksi dari beberapa komponen yaitu kualitas kehidupan sosial, sumber daya dan partisipasi.

asil penelitian di lokasi penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan

keadilan distributif di kawasan muara angke oleh beberapa faktor yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Penurunan pada keadilan distributif secara tidak langsung menurunkan kualitas kehidupan sosial masyarakat, partisipasi masyarakat dan sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pembahasan mengenai hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kehidupan sosial

Menurunnya keadilan distributif di kawasan muara angke berdampak pada penurunan di kualitas kehidupan sosial masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan apa yang pak lurah Kelurahan Pluit keluhkan, yaitu PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat). Dia menuturkan bahwa kelurahan Pluit terbagi menjadi tiga zona

dan PHBS masing-masing zona cenderung berbeda satu sama lain.

Selain itu, lingkungan sekitar kawasan muara angke juga sangat berbeda dengan lingkungan zona lainnya. Kawasan pesisir muara angke merupakan lingkungan yang terbilang cukup parah. Sebagian warganya tinggal di bangunan semi permanen yang kotor dan kumuh, bahkan ada yang rumahnya tidak beralaskan tanah, tetapi timbunan kulit kerang atau endapan sampah. Ketika air laut pasang, rumah mereka tergenang dan tidak dapat lagi digunakan untuk beristirahat. Selain itu, legalitas kependudukan beberapa warga juga memaksa mereka untuk selalu siap menghadapi penggusuran. Lingkungan hidup yang seperti ini tentu saja memberikan standar keamanan dan kenyamanan yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator juga sudah berupaya dalam meningkatkan tugas nya dalam meningkatkan keadilan distributif di kawasan ini. Salah satu upayanya adalah dengan menempatkan pos-pos polisi dan bekerja sama dengan aparat keamanan seperti TNI dan POLRI. Selain itu juga ada penataan daerah kumuh untuk meningkatkan kemandirian dan kenyamanan

di sana. Terbukti, beberapa titik yang tersentuh dengan program pemerintah mengalami peningkatan kualitas kehidupan sosial. Beberapa titik tersebut adalah kawasan dermaga dan rumah susuh. Kedua kawasan itu mengalami peningkatan pada kualitas kehidupan sosialnya baik pada kesehatan dan kesejahteraannya, lingkungan hidup, dan keamanan serta kenyamanannya. Sebaliknya, beberapa titik yang tidak bisa menguatkan keadilan distributifnya sendiri dan tidak mendapatkan bantuan program pemerintah mengalami pelemahan dalam keadilan distributif dan kualitas kehidupan sosial.

2. Sumber Daya

Komponen berikutnya adalah sumber daya. Keadaan masyarakat muara angke yang terdiri dari pendatang dan komposisinya bisa berubah-ubah kapanpun menjadi masalah tersendiri bagi kemampuan mereka dalam mengakses sumber daya. Dalam kegiatan ekonomi, Beberapa nelayan kecil menyandarkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan dengan menggunakan perahu kecil sangat tergantung pada cuaca. Pada cuaca ekstrim, akses menuju sumber dayanya yaitu laut sudah pasti tertutup dan terpaksa memulung.

Pemerintah sebagai regulator

keadilan juga tidak mampu berbuat banyak karena penyaluran bantuan dari APBD tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan masalah data yang masih belum valid sampai saat ini.

Masalah lainnya adalah, di beberapa titik pada kawasan RW 22 masih bermasalah berkaitan dengan legalitas tanah hunian dan status kependudukan. Pada konteks lain, yaitu akses ke fasilitas dan pelayanan publik seperti kesehatan, keamanan dan pendidikan, tidak ditemukan beberapa titik yang bermasalah tadi. Fasilitas keamanan dapat ditemukan di dermaga yang terletak cukup dekat dari RW 22, sedangkan, fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan formal terdekat yaitu SDN 05 terletak di RW 01 dan SMP 261 di RW 21 dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas terletak di RW 01 di depan SDN 05.

Akses menuju fasilitas dan layanan publik tergolong cukup baik di kawasan muara angke, meski demikian, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Program pemerintah berupa alokasi APBD yang berbentuk BLT, bantuan biaya

sekolah dan sebagainya juga tidak bisa mencapai mereka karena masalah legalitas kependudukan. Akibatnya, akses ke sumber daya pendidikan dan keterampilan hanya dinikmati sebagian masyarakat muara angke saja.

Padahal, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan keadilan atau dalam istilah lain mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Rawls menyebutkan bahwa nilai pendidikan tidak boleh dinilai semata-mata dalam hal efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pendidikan berperan dalam memungkinkan seseorang dalam memberikan rasa aman akan nilainya sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakatnya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menikmati dan ikut serta dalam budaya masyarakatnya.¹⁵ Untuk meningkatkan nilainya di dalam masyarakat sehingga dapat berpartisipasi lebih leluasa, seseorang akan melakukan upaya untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Partisipasi setiap individu dalam hal ini juga merupakan komponen keadilan yang akan dibahas di sub judul berikutnya. Maka dari itu, pernyataan rawls di atas selain menjelaskan bahwa pendidikan

¹⁵ Rawls, *op. Cit.*, hlm. 87.

adalah salah satu faktor utama penunjang terwujudnya keadilan distributif sekaligus juga dapat mengurangi tingkat kesenjangan di suatu kelompok sosial.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal pada kawasan yang sudah jelas baik status kependudukan dan legalitas tanah huniannya tidak begitu bermasalah dalam mengakses sumber daya. Meskipun ada beberapa warga yang kesulitan mengakses sumber daya ekonomi dikarenakan faktor keahlian, program bantuan pemerintah dapat meraih mereka, sehingga keadilan distributif masih dapat terlaksana sehingga dapat membantu mereka mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Untuk itu, dalam konteks ini, program yang terus digalakkan oleh pemerintah yaitu penertiban kawasan kumuh dan legalitas kependudukan merupakan program yang tepat. Harapannya, dengan terlaksananya program tersebut, pemerintah dapat meningkatkan keadilan distributif di kawasan Muara Angke sehingga dapat meningkatkan upaya pemerataan akses ke sumber daya baik ekonomi, fasilitas dan pelayanan publik, maupun pendidikan dan keterampilan.

3. Partisipasi

Komponen berikutnya adalah komponen yang cukup penting karena mempunyai dampak langsung terhadap keadilan, yaitu partisipasi. Rawls mengemukakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta, dan untuk menentukan hasil dari proses konstitusional yang menetapkan undang-undang yang dengannya mereka harus patuhi.¹⁶ Berarti, partisipasi setiap individu dalam kehidupannya sebagai masyarakat Indonesia yang diatur oleh UUD 1945 dan peraturan lainnya berpengaruh terhadap pembentukan keadilan distributif di lingkungan mereka. Partisipasi tersebut, sesuai dengan UUD mencakup beberapa aspek, yaitu partisipasi sosial (UUD 1945 pasal 28F), politik dan kewarganegaraan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), pertahanan dan keamanan (UU No. 3 th. 2002 pasal 1 ayat 2), dan partisipasi ekonomi (UUD 1945 pasal 33 ayat 1-5). Dengan begitu, komponen ini, selain sesuai dengan konsep keadilan Rawls, juga selaras dengan prinsip keadilan Indonesia.

Kasus pelemahan keadilan distributif di Muara Angke menimbulkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 194.

pelemahan juga pada aspek partisipasi. Contoh konkrit kasus ini adalah penurunan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial di area tembok bolong dan sekitarnya. Warga sekitar tembok bolong mengaku tidak kenal dan tidak ada interaksi sosial dengan mereka, bahkan menganggap mereka sebagai pengganggu.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan sosial, di mana warga tembok bolong dianggap bukan bagian dari muara angke oleh beberapa pihak. Dengan begitu, selain tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, meskipun mereka dalam kesehariannya melakukan kegiatan ekonomi, mereka melakukannya bukan di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal, tepatnya di tempat pelelangan ikan yang terletak agak jauh. Ini menunjukkan bahwa mereka juga absen dari partisipasi ekonomi dengan lingkungan sekitar.

Selanjutnya, identitas mereka sebagai warga pendatang yang tidak seluruhnya ber-KTP DKI dan bahkan dikucilkan dari lingkungan nya sendiri membuat mereka mustahil untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan kewarganegaraan di daerah tersebut seperti pemilihan kepala desa atau wakil daerah, membayar pajak, atau kegiatan

lainnya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menciptakan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan lingkungan sekitar, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Maka terbukti, dalam konteks ini, lemahnya keadilan distributif pada sebuah kelompok sosial selain dapat menurunkan kualitas partisipasi masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik dan kewarganegaraan, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan, juga dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat muara angke secara menyeluruh.

Pada akhirnya, dalam perspektif konsep keadilan distributif, kasus kesenjangan sosial ekonomi di muara angke diterjemahkan menjadi ketidakadilan atau keadilan distributif yang lemah. Hal ini berdampak pada beberapa komponen yang mencakup beberapa aspek yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas masyarakat setempat. Dalam proses nya, upaya pemerintah sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan di kawasan muara angke. Meski begitu, lemahnya keadilan distributif menjadikan kondisi Muara Angke sampai saat ini masih bermasalah dan terus menciptakan hambatan tersendiri bagi terwujudnya keadilan tersebut serta terbebas dari kasus

kesenjangan ekonomi sosial di kawasan tersebut.

Singkatnya, lemahnya keadilan distributif di kawasan muara angke berdampak pada rentannya masyarakat setempat terhadap masalah-masalah baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.

Dampak Deprivasi terhadap kondisi masyarakat muara angke

Membahas kondisi kesenjangan sosial ekonomi di muara angke, teori Deprivasi relatif menjelaskan proses transformasi kesenjangan sosial ekonomi menjadi ancaman. Deprivasi relatif didefinisikan sebagai perbedaan yang dirasakan antara expectation value (nilai harapan) dan expectation value (nilai kemampuan) seseorang. Nilai ekspektasi adalah barang dan kondisi kehidupan yang diyakini berhak untuk didapatkan oleh seseorang. Sedangkan nilai Kemampuan adalah barang dan kondisi yang menurut seseorang mampu capai atau pertahankan, mengingat sarana sosial yang tersedia bagi nya.¹⁷ Derajat kesenjangan antara nilai ekspektasi dan nilai kemampuan tersebut membuat seseorang merasa terdeprivasi. Selain itu, ada dua komponen lain yang

mempengaruhi Deprivasi Relatif yaitu salience (nilai penting) dan kesempatan.

¹⁸ Peningkatan pada setiap komponen tersebut meningkatkan intensitas deprivasi pada diri seseorang.

Selanjutnya, Perasaan terdeprivasi pada seseorang menimbulkan rasa frustrasi yang kemudian mendorong orang untuk melakukan tindakan inovatif untuk mengeluarkan diri nya dari kondisi tersebut. hal ini dijelaskan oleh Gurr dalam bukunya why men rebel? Bahwa alasan mengapa perilaku inovatif wajar terjadi dalam menanggapi ketegangan sudah cukup jelas: proses sosialisasi mengajarkan seseorang untuk belajar menghindari rangsangan yang tidak menyenangkan. Prinsip-prinsip ini beroperasi dalam berbagai perilaku individu, termasuk tindakan mereka yang memberontak terhadap komunitas politik mereka.¹⁹

Berarti, salah satu dampak deprivasi adalah pemberontakan terhadap komunitas politik atau dalam istilah lain melakukan kegiatan yang melanggar peraturan. Bentuk pelanggaran tersebut bermacam-macam sesuai intensitas deprivasi yang dialami yang dipengaruhi oleh 3 komponen tersebut di atas. Untuk

¹⁷ Gurr, *op. cit.*, hlm. 13.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 59.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 22 -23.

itu, peneliti akan membahas dampak deprivasi terhadap masyarakat muara Angke dalam dua kategori, deprivasi di yg tidak berujung tindakan dan yg tidak dengan tindakan.

a. Deprivasi tidak berujung tindakan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya intensitas ketiga komponen deprivasi relatif dapat mendorong seseorang melakukan tindakan inovatif sebagai respon dari rasa frustrasi. Salah satu narasumber yang merupakan seorang nelayan kecil yang tinggal di pesisir pantai menuturkan ketidaksukaannya terhadap sistem pemerintahan yang ditetapkan di lingkungan tempat dia tinggal. Alasannya, jabatan politik seperti RT dan RW diduduki oleh orang-orang yang menurutnya tidak pas. Menurutnya, hal ini juga diakui oleh beberapa warga setempat. Dalam kasus ini, Dia terdeprivasi dengan kondisi ini karena terjadi kesenjangan antara expectation value nya (dipimpin oleh orang yang sesuai dengan harapan) dan ability value nya (melakukan perubahan pada tatanan politik agar sesuai dengan harapan). Namun perasaan tersebut tidak sampai mendorong dia untuk melakukan respon inovatif karena beberapa alasan yang

peneliti simpulkan berdasar pada teori deprivasi relatif.

Alasan yang pertama adalah, dia dan warga lain yang terdeprivasi menganggap bahwa kesempatan untuk mencapai nilai ekspektasinya (merubah tatanan sosial) kecil, karena orang-orang yang menduduki jabatan politik tersebut memiliki kekuatan yang relatif lebih besar dari mereka. Yang kedua, mereka menganggap nilai ekspektasinya tidak begitu bernilai penting, dibandingkan dengan hal lain yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena kondisi ekonominya yang relatif lemah. Yang ketiga, derajat ketimpangan antara ability value dan expectation valuenya karena kondisi nya yang tidak begitu terpengaruh oleh kondisi politik di daerah tersebut, sehingga perhatian dia terhadap politik rendah. Rendahnya ketiga komponen deprivasi relatif tersebut menjadikan warga tersebut memilih untuk tidak merespon atas deprivasi yang dia rasakan.

b. Deprivasi berujung tindakan

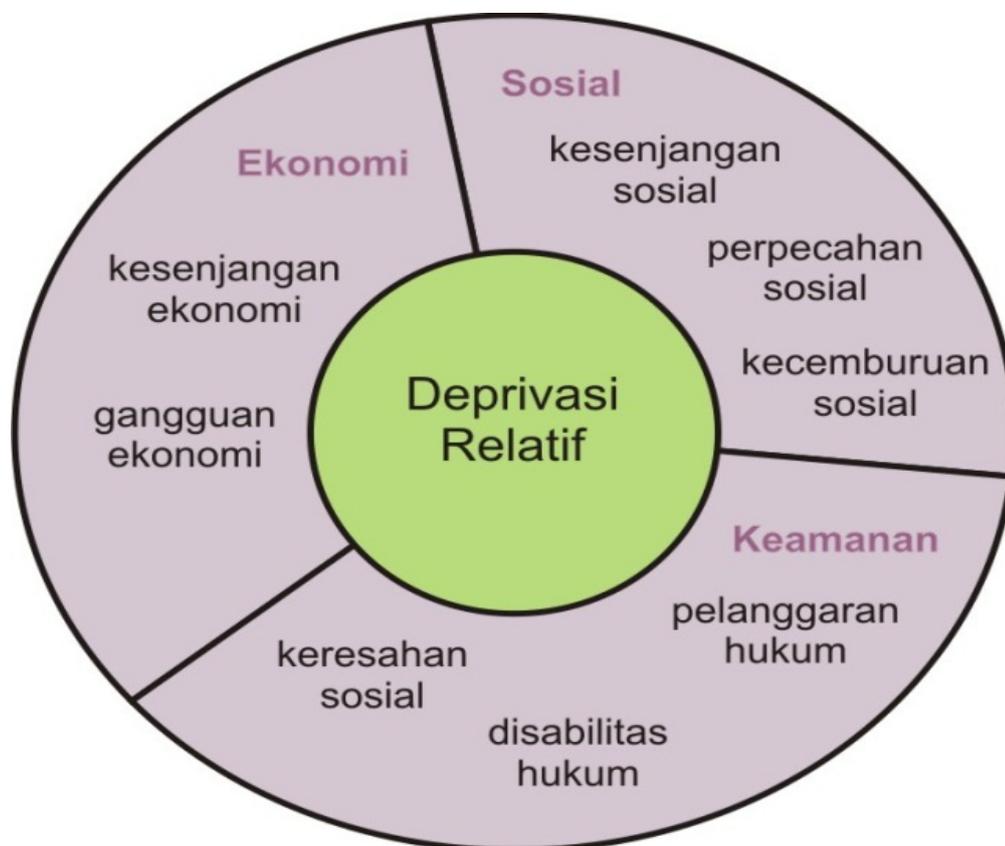
Di sisi lain, Kasus deprivasi terjadi pada intensitas yang lebih tinggi terbukti menimbulkan masalah di Muara Angke. Salah satu kasus yang peneliti temukan adalah kasus pemukiman ilegal warga

pendatang. Setelah ditelusuri, munculnya pemukiman ini ternyata berawal dari perasaan terdeprivasi warga pendatang. Pada awalnya, pemukiman nelayan kali adem mengalami penggusuran oleh pemerintah pada tahun 2003. Nilai ekspektasi mereka yaitu mendapatkan tempat tinggal di Jakarta untuk dapat mencari nafkah tidak sesuai dengan nilai kemampuan mereka yaitu mendapatkan tempat tinggal yang mereka harapkan dan malah terhalang oleh kebijakan politik yaitu penggusuran. Oleh karena itu, mereka mengadakan protes menuntut keadilan. Pemerintah kemudian menanggapi protes tersebut dan membangun rumah susun untuk menampung warga tersebut. Namun, karena pembangunan rumah susun yang memakan waktu, warga pindah mencari tempat tinggal sementara dan mulai mengisi tanah kosong yang ada di sana tanpa izin resmi.

Tindakan tersebut juga merupakan bentuk pemberontakan terhadap komunitas politik sebagai akibat dari rasa frustrasi yang disebabkan kondisi terdeprivasi, yang mana Nilai ekspektasi mereka yaitu mendapatkan tempat tinggal sebagai ganti dari tempat tinggal yang digusur tidak sesuai dengan nilai kemampuan mereka yaitu menciptakan

tempat tinggal baru sesuai yang mereka harapkan karena kondisi ekonomi mereka yang lemah. Namun meskipun pembangunan rusun sudah selesai, warga terlanjur sudah betah tinggal di tempat tinggal mereka saat itu, dan menempatinnya hingga saat ini.

Kasus pelanggaran di atas terjadi karena masing-masing komponen deprivasi relatif cenderung berintensitas tinggi. Yang pertama, derajat ketimpangan yang tinggi yaitu nilai kemampuan mereka dalam mencapai nilai ekspektasi selain terhambat oleh faktor ekonomi juga oleh faktor politik dengan adanya intervensi pemerintah. Yang kedua, mereka menganggap tempat tinggal di Jakarta adalah hal yang sangat penting atau mempunyai nilai (*salience*) yang tinggi. Yang terakhir, mereka melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal sebagai ganti dari tempat tinggal sebelumnya yang digusur sehingga melakukan unjuk rasa. Terbukti, pemerintah daerah memberikan apa yang mereka tuntut yaitu menyediakan rumah susun, namun karena proses konstruksinya membutuhkan waktu, mereka melakukan tindakan lain. Tindakan tersebut berupa menempati kawasan kosong di muara angke tanpa izin. Hal ini



Gambar 4. Matriks Deprivasi Relatif
 Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019

dilakukan karena mereka melihat kesempatan untuk tinggal di Jakarta – sesuai dengan nilai ekspektasi mereka – tanpa harus menunggu selesainya konstruksi rumah susun. Menetapnya para pendatang di tanah-tanah kosong itu menimbulkan masalah baru. Untuk mempermudah pembahasan, masalah-masalah tersebut peneliti bagi menjadi 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi dan keamanan.

1. Sosial

Pada aspek sosial, kasus deprivasi yang menimbulkan kedatangan para pendatang di kawasan baru menimbulkan beberapa masalah. Penduduk sekitar yang sudah menempati kawasan itu sejak lama memandang hadirnya mereka

(pendatang) sebagai gangguan. Selain menimbulkan kesenjangan sosial karena perilaku mereka yang cenderung seenaknya, sebagian warga juga merasakan kecemburuan sosial karena merasa lebih berhak atas pemanfaatan tanah kawasan tersebut, termasuk tanah yang mendadak ditempati pendatang tanpa izin. Akibatnya terjadi perpecahan sosial antara warga setempat dengan warga pendatang yang meskipun sekarang sudah berstatus resmi, warga setempat enggan mengakui pendatang sebagai bagian dari mereka sehingga tidak tercipta kerukunan antar warga.

2. Ekonomi

Dampak yang muncul pada aspek

ekonomi tidak terlalu terlihat karena pada dasarnya para pendatang tidak banyak melakukan kegiatan ekonomi di sana. Meski begitu, kondisi ekonomi masyarakat pendatang yang cenderung lemah jika dibandingkan masyarakat sekitar meningkatkan kesenjangan ekonomi. Meskipun kesenjangan tersebut tidak bisa diukur karena data yang sangat minim dan berubah-ubah, kualitas fasilitas hidup secara fisik mereka seperti rumah dan lingkungan hidup menunjukkan kesenjangan yang cukup bisa menggambarkan kondisi ekonomi mereka.

Selain itu, sebagian lahan yang mereka pakai secara ilegal untuk perumahan adalah milik perusahaan atau pengusaha tertentu. Pemerintah daerah mengakui adanya pengaduan dari perusahaan dan pengusaha tersebut terkait dengan kegiatan ekonomi mereka yang terhambat akibat hilangnya sebagian sumber daya yang mereka miliki tidak bisa dimanfaatkan. Akibatnya kegiatan ekonomi mereka terganggu dan tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Pemerintah juga mengalami kerugian karena lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha atau perusahaan tadi sehingga dapat menghasilkan retribusi baik berupa pajak

penghasilan, pajak bumi dan bangunan atau yang lainnya ditempati secara ilegal tanpa ada bentuk pembayaran pajak apapun dari mereka yang menempati lahan tersebut, bahkan listrik yang mereka pakai pun kabarnya didapat secara ilegal.

3. Keamanan

Pada segi keamanan, seperti telah dibahas sebelumnya, deprivasi mendorong para pendatang untuk melakukan pelanggaran hukum yaitu menempati lahan sebagai tempat tinggal mereka secara ilegal. Selanjutnya, timbul dampak lain yang diakui oleh masyarakat sekitar di kawasan tersebut. Menurut pengakuan beberapa narasumber yang tinggal di sekitar kawasan tembok bolong, Warga pendatang dikenal sebagai masyarakat yang tidak taat hukum, dan cenderung primitif. Maksudnya, masalah yang terjadi di kawasan tersebut tidak bisa diselesaikan secara hukum. Misalnya, warga tembok bolong yang kerap menimbulkan masalah seperti membuat akses masuk dengan melubangi tembok pembatas dan parkir sembarangan tidak bisa langsung ditertibkan oleh aparat keamanan. Bahkan menurut keterangan warga sekitar, ada oknum polisi yang menuturkan bahwa polisi setempat

sudah malas berurusan dengan mereka karena susah diatur dan main keroyokan. Ini berarti hukum sosial yang berlaku sebelumnya melemah atau bahkan tidak lagi mempunyai kekuatan di kawasan tersebut. Selain itu, ada juga informasi yang menerangkan bahwa setelah kedatangan mereka, kerap terjadi kerusuhan, bahkan sempat terjadi kerusuhan bersenjata, pencurian, dan kasus narkoba. Kabar mengenai kerusuhan ini tidak tersebar karena mereka sengaja tutupi, namun tetap saja ada perasaan resah pada diri mereka.

Kesimpulan dapat diambil dari bahasan pada sub judul ini adalah, pada satu sisi, kondisi ekonomi yang lemah menjadi penyebab terjadinya deprivasi, namun dalam kasus tertentu malah menjadi faktor yang menekan mereka untuk tidak bereaksi terhadap deprivasi. Di sisi lain, pada intensitas tertentu, kasus yang berujung respon inofatif berupa pelanggaran peraturan yang terjadi di Muara angke terbukti berdampak pada munculnya masalah yang bahkan melahirkan beberapa masalah baru. Masalah-masalah tersebut sampai sekarang masih berlanjut dan terus berkembang. Singkatnya, Deprivasi yang

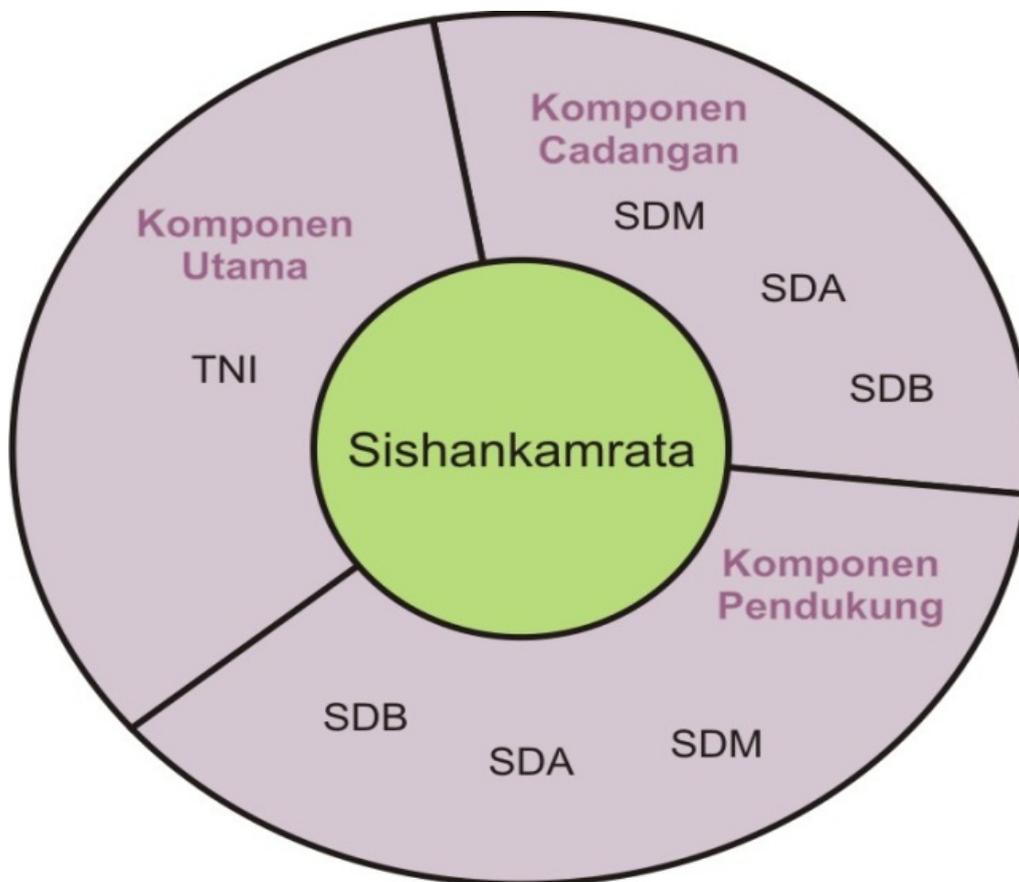
terjadi berdampak negatif pada kondisi masyarakat muara angke yang kemudian mengalami beberapa masalah yang cukup pelik pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan keamanan.

Dampak kondisi masyarakat Muara Angke terhadap sishankamrata

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sishankamrata adalah akronim dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini terdiri dari dua variabel yaitu pertahanan dan keamanan. Untuk mengatasi ancaman bagi pertahanan dan keamanan tersebut, negara mempersiapkan postur pertahanan yang terdiri dari tiga komponen yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.²⁰

Keikutsertaan setiap individu dalam upaya pertahanan dan keamanan dalam konsep sishankamrata sudah diatur sejak berdirinya Indonesia. Undang-Undang dasar 1945 mencatat bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan dan keamanan

²⁰ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 11



Gambar 5. Matriks Sishankamrata
 Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019

negara.²¹ Selain itu, undang-undang No. 3 th. 2002 juga menetapkan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya nasional yang termasuk dalam komponen cadangan dan pendukung sistem pertahanan.²² Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara merupakan komponen yang mempunyai pengaruh dalam membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Gambar 5 menunjukkan konstruksi sishankamrata yang terdiri dari komponen utaman, komponen cadangan dan komponen pendukung. Konstruksi

tersebut sesuai dengan undang-undang republik indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan negara pasal 1. Karena sishankamrata merupakan sistem yang menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen dalam upaya penguatan pertahanan dan keamanan, pelemahan atau penguatan pada salah satu komponen tersebut berdampak pada kekuatan sistem tersebut secara keseluruhan. Dapat kita lihat pada komponen cadangan dan pedukung bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aspek pembentuk

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 Ayat 3 dan pasal 30 Ayat 1.

²² Undang-undang No. 3, th. 2002 Pasal 1.

sishankamrata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia juga mempunyai pengaruh terhadap sishankamrata.

Kondisi muara angke yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya secara tidak langsung berdampak pada kekuatan sishankamrata. Dampak tersebut terbagi menjadi dua dimensi yaitu pelemahan dan ancaman.

1. Pelemahan

Masyarakat Muara Angke mengalami penurunan pada kualitas keadilan distributif sebagai dampak dari kasus ketimpangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh motif ekonomi. Keadilan distributif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dikonstruksi oleh beberapa komponen. Komponen tersebut mencakup beberapa kebutuhan dasar manusia yaitu sumber daya ekonomi, keamanan, kesehatan, kesejahteraan. Dalam hal ini pendekatan kapabilitas oleh Amartya Sen menjelaskan hubungan antara kondisi masyarakat Muara Angke dengan sishankamrata.

Menurut Sen, Kapabilitas berfungsi mencakup tiga aspek kunci yaitu: Pertama adalah kecukupan, yang meliputi

kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. Kedua adalah harga diri, yang mencakup dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, jati diri dan lain sebagainya. Ketiga adalah kebebasan dari sikap menghamba.²³ Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut belum tercukupi, maka seseorang belum bisa berfungsi secara optimal. Hal ini menjelaskan bahwa komponen pertahanan dan keamanan yang mencakup manusia sebagai salah satu sumber kekuatannya, akan terdampak oleh kondisi atau kualitas manusia yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia.

Hal ini terjadi pada beberapa warga di muara angke, yang melepaskan diri dari partisipasi baik dalam aspek sosial, politik dan kewarganegaraan dan partisipasi pertahanan dan keamanan karena bermasalah pada faktor ekonomi. Kondisi mereka yang seperti itu mendorong mereka untuk fokus memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya dan mengesampingkan partisipasinya sebagai salah satu warga negara yang berkewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti yang

²³ Sri Henny Indarti, "Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen", IJPA-The

Indonesian Journal of Public Administration, Volume 3, Nomor 1, Juni 2017, 37.

tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi masyarakat muara angke yang lemah secara ekonomi berdampak negatif terhadap sishankamrata.

Selain itu, pada kasus sebelumnya ada narasumber yang menyatakan bahwa semua aparat mulai dari polisi, dinas perikanan, RT dan RW dianggap sebagai preman. Anggapan tersebut berarti bahwa aparat tidak dianggap sebagai sebuah eksistensi yang patut dihargai dan dihormati. Tidak adanya penganggapan ini berdampak pada ruang gerak dan keleluasaan para aparat tersebut dalam menjalankan fungsinya yang menjadi terbatas. Lebih jauh lagi, anggapan tersebut juga menunjukkan minimnya kerjasama warga setempat dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk pemenuhan hak mereka. Sedangkan, prinsip keadilan Rawls yang ke 2 menyatakan bahwa Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya bermanfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.²⁴ Anggapan itu berarti pelemahan peran dan arti penting aparat

dalam mewujudkan keadilan di kawasan tersebut.

Kesimpulannya, kondisi masyarakat Muara Angke menimbulkan pelemahan pada perannya sebagai komponen cadangan maupun pendukung sehingga berdampak negatif pada kekuatan sishankamrata secara menyeluruh.

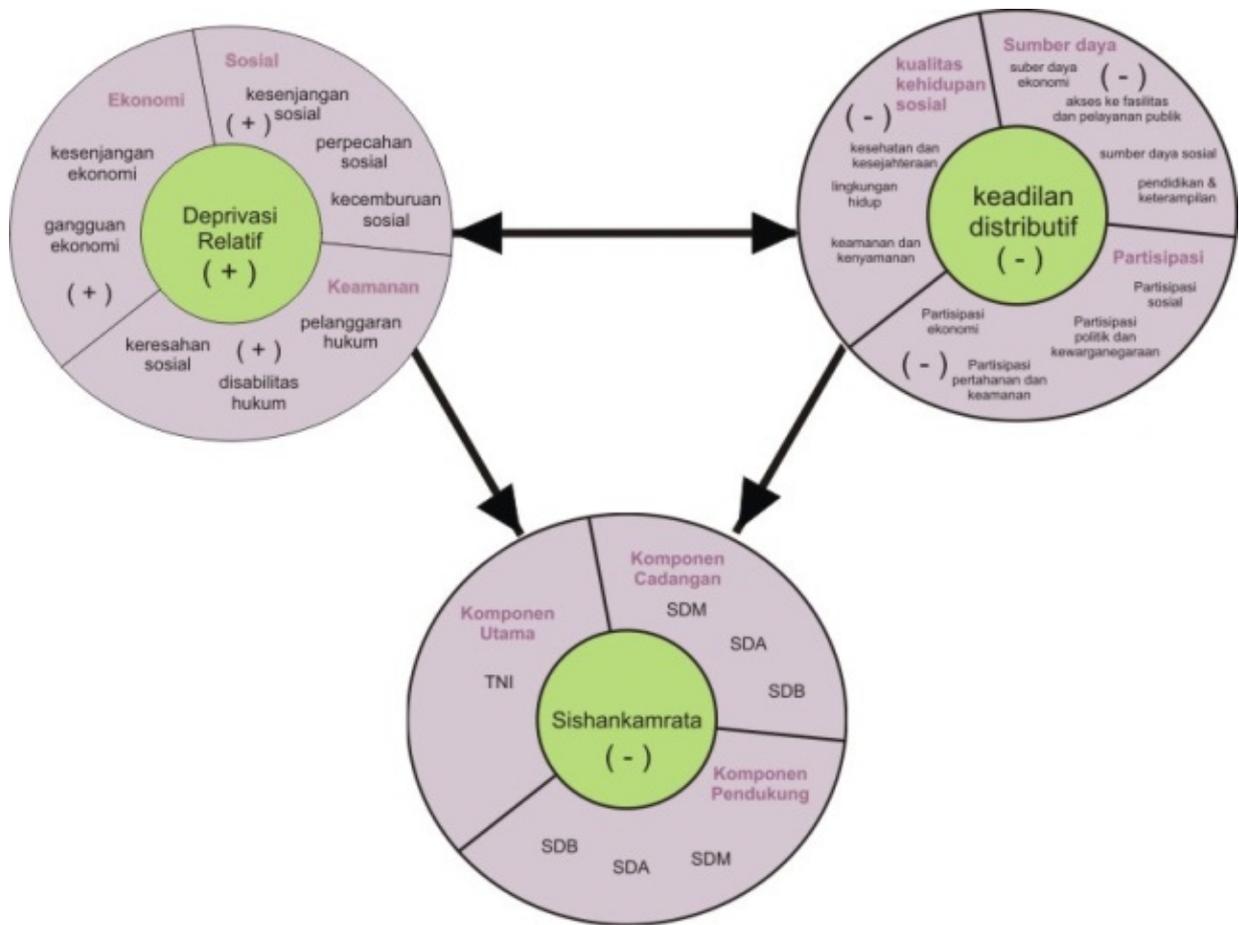
2. Ancaman.

Buku Putih Pertahanan Indonesia menerangkan bahwa ancaman digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan gabungan atau hibrida. Dampak yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.²⁵ Pernyataan tersebut berarti bahwa segala hal yang mengganggu stabilitas aspek-aspek tersebut dapat disebut sebagai ancaman baik berbentuk militer, nonmiliter, maupun hibrida.

Dalam konteks ancaman sesuai buku putih, kondisi masyarakat Muara Angke berpotensi menciptakan ancaman nonmiliter. Social unrest concept (konsep keresahan sosial) menyatakan bahwa ketidakpuasan kolektif terhadap sistem politik dapat bermanifestasi menjadi aktivitas protes yang tidak konvensional.

²⁴ Rawls, *op. cit.*, hlm. 4.

²⁵ Kemhan, *op. cit.*, hlm. 22.



Gambar 6. Sintesis Keadilan, Deprivasi dan Sishankamrata
 Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019

Berarti, kasus ketimpangan sosial ekonomi di Muara Angke berhubungan erat dengan ketidakadilan dan dapat bertransformasi menjadi keresahan sosial. Proses transformasi ini dijelaskan oleh teori deprivasi relatif yang menjelaskan bahwa perbedaan antara capability value (nilai kemampuan) dan expectation value (nilai harapan) pada seseorang dapat menimbulkan keresahan dalam dirinya dan jika keresahan ini tidak teratasi, akan timbul rasa frustrasi yang jika terakumulasi dapat menimbulkan kemarahan dan dapat mengarah pada kekerasan. Efek yang ditimbulkan oleh deprivasi sosial ekonomi telah dijelaskan

sebelumnya dan terbukti menimbulkan gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan di Muara Angke. Hal ini bisa diartikan bahwa kondisi muara angke saat ini mengandung ancaman nonmiliter berdimensi ekonomi, sosial dan keamanan sehingga berdampak negatif terhadap sishankamrata.

Merangkum hubungan dampak yang ditimbulkan oleh kondisi masyarakat Muara Angke terhadap sishankamrata, peneliti membuat sintesis antara keadilan, deprivasi, dan sishankamrata dapat dilihat pada Gambar 6.

Keadilan distributif yang lemah dan intensitas deprivasi yang tinggi saling

mempengaruhi satu sama lain. Pada sudut pandang keadilan distributif, Kondisi keadilan yang lemah itu menimbulkan pelemahan pada kualitas sumber daya, kehidupan sosial dan partisipasi masyarakat muara angke. Lemahnya kualitas tersebut dalam konteks sishankamrata diartikan sebagai lemahnya daya masyarakat muara angke dalam upaya pertahanan dan keamanan. Beralih ke sisi yang lain, intensitas deprivasi yang cukup tinggi di muara angke bermanifestasi menjadi berbagai masalah baru yang sampai sekarang dialami oleh masyarakat setempat. Masalah tersebut berdampak pada 3 aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan keamanan. Dalam konteks sishankamrata, gangguan pada stabilitas ipoleksosbudhankam diterjemahkan sebagai ancaman. Berarti, kondisi masyarakat Muara Angke jika dilihat dari perspektif deprivasi relatif berdampak pada pembentukan ancaman multidimensional yang bersumber dari aspek ekonomi, sosial dan keamanan. Sehingga, kondisi tersebut yang masih terus berlangsung dalam masyarakat muara angke berdampak negatif bagi sishankarata.

Ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan ketika membahas hasil

penelitian ini. Yang pertama, ketersediaan data dari institusi resmi yang sangat minim menimbulkan kemungkinan bahwa data yang peneliti pakai kurang objektif dan menyeluruh. Yang kedua, beberapa calon narasumber tidak berhasil dimintai keterangan melalui wawancara, sehingga ada beberapa informasi yang didapatkan tanpa sepengetahuan narasumber. Karena itu peneliti tidak mendapatkan keterangan tentang siapa narasumber tersebut dan ada beberapa keterangan yang tidak terekam. Terlepas dari keterbatasan ini, penelitian ini memajukan pengetahuan yang ada tentang bentuk ancaman non-militer. Bahkan jika ada upaya lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya menguatkan pertahanan negara, khususnya dalam aspek pertahanan nir-militer berdimensi ekonomi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah membahas hasil temuan dan penelitian tentang ketimpangan sosial ekonomi di Muara Angke dan dampaknya terhadap Sishankamrata, peneliti merangkum beberapa poin yang perlu diperhatikan sekaligus menyimpulkan hasil penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Masyarakat Muara Angke hidup pada kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya kualitas keadilan di kawasan tersebut sehingga berdampak pada rentannya masyarakat setempat terhadap masalah-masalah baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Kelemahan kualitas keadilan tersebut berdampak pada kondisi masyarakat Muara Angke dalam beberapa aspek yaitu kualitas kehidupan sosial, sumber daya, dan partisipasi. Di sisi lain, ketimpangan tersebut juga menimbulkan deprivasi yang terjadi berdampak negatif pada kondisi masyarakat muara angke yang kemudian bermanifestasi menjadi beberapa masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan dan terus berkembang pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan keamanan.
- b) Kondisi kesenjangan sosial

ekonomi secara kualitatif berdampak pada sishankamrata pada dua dimensi. Pertama, Lemahnya kualitas kualitas sumber daya, kehidupan sosial dan partisipasi masyarakat dalam konteks sishankamrata berdampak negatif pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia sebagai salah satu unsur pembentuk komponen pertahanan dalam upaya pertahanan dan keamanan. Yang kedua, intensitas deprivasi yang cukup tinggi di muara angke bermanifestasi menjadi berbagai masalah baru yang sampai sekarang dialami oleh masyarakat setempat. Masalah tersebut berdampak pada 3 aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan keamanan. Dalam konteks sishankamrata, gangguan pada stabilitas ipoleksosbudhankam diterjemahkan sebagai ancaman. Berarti, kondisi masyarakat Muara Angke jika dilihat dari perspektif deprivasi relatif berdampak pada pembentukan ancaman

multidimensional yang bersumber dari aspek ekonomi, sosial dan keamanan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dielaborasi melalui kesimpulan tersebut, maka dalam hal ini dibuat beberapa masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu bertindak secepatnya dalam mengatasi masalah kependudukan, karena sebagian besar masalah yang timbul di Muara Angke disebabkan oleh warga pendatang.
2. Masalah ketimpangan sosial ekonomi di Muara Angke banyak ditimbulkan oleh para pendatang yang berasal dari berbagai daerah lain seperti indramayu, serang dan lain sebagainya yang dilatarbelakangi motif ekonomi, yaitu mencari penghidupan atau meningkatkan taraf ekonomi mereka. Berarti, mereka mengakui bahwa akses menuju sumber daya di kampung mereka cenderung lebih sedikit daripada di Jakarta. Dalam hal

ini, konsep ekonomi inklusif merupakan titik penting yang tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam rangka penguatan Sishankamrata.

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah cakupan obyek penelitian ini dengan menganalisa upaya untuk menyelesaikan kasus kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia sehingga dapat menguatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- John Rawls. A Theory of Justice. 1999. Massachusetts: Belknap Press.
- Kemhan. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta.
- Reiko Gotoh dan Paul Dumouchel. 2009. Against Injustice The New Economics of Amartya Sen. Cambridge: Cambridge university Press.
- Sen, Amartya. The Idea of Justice. 2009. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.Siahaan,
- Supriatna, Agus. Pertahanan Nasional dalam Perspektif Ekonomi. 2017. Bandung: Unpad Press.
- Ted Robert Gurr. 1970. Why Men Rebel. (New Jersey: Princeton University Press.

Jurnal

- Hadiz, Vedi, 2011. "Indonesian Political Islam: Capitalist Development and The Legacies of The Cold War". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Indarti, Sri Henny. 2017. "Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen". *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, Volume 3, Nomor 1.
- S. Syawaluddin. 2015. "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan kemiskinan". *Jurnal Al- Buhuts*. Volume 11 Nomor 1 Juni.

Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 Ayat 3 dan pasal 30 Ayat 1.
- Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 11.

Intenet/ Website

- Isriadhi, Candra. "Karena Sering Diejek Teman Gaji Lebih Kecil, Pria Ini Tega Habisi Kedua Rekan Kerjanya". dalam <http://style.tribunnews.com/2018/08/13/karena-sering-diejek-teman-gaji-lebih-kecil-pria-ini-tega-habisi-kedua-rekan-kerjanya?page=2>. diakses pada 2 September 2018.

